

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Internasionalisme

Menurut ilmu politik, internasionalisme mengacu pada gagasan bahwa kerjasama antar negara berbeda dan bermanfaat bagi semua orang. Pemerintah yang menganut doktrin internasionalisme bekerjasama dengan pemerintah lain untuk menghindari konflik dan bekerjasama secara ekonomi. Sebagian besar penggemar internasionalisme juga mendukung “perdagangan bebas”, dimana negara-negara bebas membeli dan menjual barang tanpa khawatir tentang perbatasan antara negara. Kebalikan dari internasionalisme adalah ultranasionalisme atau jingoisme, yang menyukai patriotisme ekstrim dan agresi terhadap negara lain.

Internasionalisme adalah prinsip politik yang melampaui nasionalisme dan mendukung kerjasama politik atau ekonomi yang lebih besar diantara bangsa-bangsa. Para pendukung prinsip ini disebut sebagai internasionalis, dan umumnya percaya bahwa orang-orang di dunia harus bersatu melintasi batas-batas nasional, politik, budaya, ras atau kelas untuk memajukan kepentingan bersama, atau bahwa pemerintah dunia harus bekerjasama karena kepentingan jangka panjang bersama lebih penting daripada perselisihan jangka pendek.

Pengertian internasionalisme menurut para ahli:

a. Dr. N. D. Arora

Internasionalisme dideskripsikan sebagai teori dan praktik kerja sama transnasional atau global. Sebagai sebuah cita-cita politik, ini didasarkan pada keyakinan bahwa nasionalisme harus dilampaui, karena ikatan yang mengikat orang-orang dari negara yang berbeda lebih kuat daripada batasan yang memisahkan mereka.

b. Duncan Hallas

Internasionalisme adalah fondasi dari sosialisme, tidak hanya atau terutama untuk alasan sentimental tetapi karena kapitalisme telah menciptakan ekonomi dunia yang dapat diubah hanya pada skala dunia.

c. Leon Trotsky

Karakter internasional dari revolusi sosialis[...] mengalir dari keadaan ekonomi saat ini dan struktur sosial kemanusiaan, internasionalisme bukanlah prinsip yang abstrak tetapi sebuah refleksi teoritis dan politik dari karakter ekonomi dunia, perkembangan dunia dari kekuatan produktif, dan dari skala dunia perjuangan keras.

d. Rebecca West

Berdasarkan tradisi Eropa ... sejak awal telah mengakui nasionalisme dan internasionalisme bukanlah pertentangan yang tidak dapat didamaikan tetapi penyeimbang yang dapat membuat negara-negara berada dalam keseimbangan.

konsep internasionalisme dalam konteks sejarahnya tidak lepas dari munculnya negara modern, yaitu *Westphalian System* (sistem hubungan internasional, yang didirikan di Eropa sehubungan dengan Perdamaian Westphalia, yang ditandatangani pada 1648 setelah Perang Tiga Puluh Tahun). Perjanjian Westphalia 1648 menjadi momentum bagi munculnya hubungan antar negara yang jauh lebih maju dan modern dari sistem kekaisaran Roma maupun negara-kota Yunani kuno. Munculnya sistem negara-bangsa telah memberikan sekat-sekat perbatasan wilayah yang jelas, otonomi, dan kemerdekaan untuk mengatur urusan internal domestik dan lepas dari penguasaan eksternal. Dengan begitu, hubungan antar negara kemudian didasarkan pada kedaulatan masing-masing dimana tidak ada satu kekuatan pun di atas kedaulatan negara. Munculnya sistem negara bangsa dan hubungan bilateral maupun multilateral antarnegara kemudian membentuk satu istilah internasional (*inter & nation*), yang menandakan interaksi dan politik negara satu dengan yang lainnya. Internasionalisme berasal dari konsep politik. Kontestasi ini telah mewarnai politik dunia sebelum dan sesudah perang dunia dan perang dingin berakhir. Internasionalisme merupakan proses formal yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan kerjasama maupun koordinasi antarnegara. Internasionalisme didasarkan pada kesadaran mengambil segala tindakan yang terkait dengan kepentingan nasional maupun bersama.⁶

⁶ Marry Allen, "Konsep Internasionalisme ke Globalisasi: Uni Eropa dalam Internasionalisme", diakses dari http://marry-allen-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-118389-INTERNASIONALISME%20KE%20GLOBALISASI%20:-Konsep%20Internasionalisme%20ke%20Globalisasi:Uni%20Eropa%20dalam%20Internasionalism e.html, pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 20.08

B. Sejarah Internasionalisme

Dengan terjadinya Revolusi Prancis, hubungan internasional, yang sampai saat itu hampir secara eksklusif merupakan hubungan antara keluarga bangsawan, berubah menjadi hubungan antara negara. Dengan kata lain, masyarakat menjadi semakin aktif di politik internasional.

Dalam perjuangan melawan prinsip dinasti, yang merupakan dasar dari monarki absolut, borjuis adalah pembawa nilai-nilai internasionalis.

Internasionalisme Demokrasi-Liberal diproklamasikan sebagai nilai universal dari kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Jiwa dari *the Declaration of the Right of Men and Citizens* (salah satu dokumen fundamental dari Revolusi Prancis, menetapkan sekumpulan hak-hak individu dan hak-hak kolektif manusia.) yang juga diproklamasikan sebagai prinsip universal, yang mana akan menghasilkan seluruh kesetiaan nasional. Prinsip tersebut, ditegaskan lewat Revolusi Prancis, yang diproyeksikan pada level universal dan merujuk pada negara, yang mana mereka secara bertahap melepaskan diri dari pemerintahan monarki yang tidak adil dan sewenang-wenang, dan untuk menjadi protagonis kehidupan politik internasional. Semua itu menempatkan masalah-masalah tatanan internasional dibawah istilah-istilah baru dan memungkinkan persaudaraan dari semua orang yang telah memenangkan hak demokratis, dan perdamaian universal, sebagai hasil dari penegasan prinsip kedaulatan rakyat.

Menurut jenis internasionalisme ini, penegasan demokrasi di Prancis akan memulai suatu proses transformasi hubungan internasional. Penyatuan dan

pengamanan dunia akan menjadi hasil dari gerakan yang meluas disekitar inti revolusioner, yang diwakili oleh negara demokrasi pertama.

Internasionalisme-Sosialis didirikan ada penegasan sifat universal dari nilai-nilai emansipasi sosial, kepada kaum proletariat. Kaum proletariat memiliki pembenaran praktis dalam kebutuhan untuk menyatukan perjuangan pekerja disemua negara melawan organisasi kapitalisme diseluruh dunia. Seruannya adalah “*Working men of all countries, unite!*”, yang merupakan akhir dari komunis manifesto.

Menurut teori dari Leninis, Revolusi Rusia hanyalah tahap pertama dari proses revolusioner yang lebih umum, yang disebabkan oleh krisis sistem kapitalis dan ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh dunia. Ia memperkenalkan ke dalam sistem negara-negara dunia suatu prinsip kontradiksi yang cenderung secara radikal mengubahnya: dengan memodifikasi sifat negara, ia juga memodifikasi aturan-aturan yang mengatur hubungan internasional.

Faktanya, menurut konsep Marxis, dimana kekuatan proletar menggantikan kekuasaan borjuis, tidak hanya antagonisme antar kelas menghilang, tetapi juga antar negara. Oleh karena itu Uni Soviet adalah cikal bakal organisasi sosialis universal dimana kekerasan, sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik internasional, tidak lagi eksis.

Dengan demikian, pada saat-saat kontinuitas sejarah telah terganggu oleh pelanggaran mendalam dari sifat revolusioner, seperti Revolusi Prancis atau Revolusi Rusia, bersama dengan aspirasi untuk emansipasi dari semua bentuk

penindasan didalam negara, cita-cita perdamaian dan solidaritas universal juga muncul. Namun, revolusi-revolusi ini, terjadi di negara-negara tunggal, sedangkan revolusi adalah konsep yang mendunia dan universal.

Ketika membicarakan tentang internasionalisme liberal, demokratis dan sosialis, yang dimaksud adalah konsep spesifik hubungan internasional, penyebab perang dan sarana untuk mewujudkan perdamaian dan tatanan internasional, dengan kata lain teori dan praktik keduanya ditunjukan untuk mewujudkan solidatas internasional. Antar orang, partai, kelas dan sebagainya.

Pemikiran liberal meyebutkan penyebab utama perang adalah struktur negara dan merkantilisme (praktik dan teori ekonomi, yang dominan di Eropa abad 16 ke abad ke-18, yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintahan suatu negara untuk tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya.). Pengenalan pemerintahan perwakilan dan pengembangan perdagangan internasional secara konsekuen seharusnya telah memadamkan perang. Mengenai hal ini, Benjamin Constant menulis: *“It is clear that the more the commercial tendency dominates, the more the warlike tendency must weaken”*.

Disisi lain, pemikiran demokratis menganggap perang merupakan watak pemerintah otoriter. Perdamaian adalah konsekuensi yang diperlukan dari pembentukan kedaulatan rakyat. Thomas Paine, yang merenungkan Revolusi Prancis, menulis mengenai hal ini: *“Monarchic sovereignty, the enemy of mankind and the source of misery, is abolished; and the sovereignty itself is*

*restored to its natural and original place, the Nation. Were this the case throughout Europe, the cause of wars would be taken away”.*⁷

Bagi para pendiri gerakan nasionalisme juga, bangsa dan kemanusiaan tidak saling bertentangan tetapi saling melengkapi. Misalnya, Giovine Europa, yang didirikan oleh Giuseppe Mazzini pada tahun 1834, disandingkan dengan *The old Europe of the Holy Alliance*. Konservatisme, hak istimewa, pemisahan dan perselisihan. Eropa baru yang lahir dari emansipasi negara, menandai permulaan fase sejarah baru dimana solidaritas manusia dan persaudaraan manusia adalah untuk mengembangkan kebijakan yang akan memungkinkan semua bangsa Eropa untuk berkolaborasi dalam kemajuan semua umat manusia. *“All collective work”*, tulis Giuseppe Mazzini. *“requires a division of work. The existence of nations is the consequence of this necessity. Every nation has a mission, a special office in collective work, a special aptitude for carrying out the office: this is its mark, its christening, its legitimacy. Every nation is a worker for humanity, it works for it, so that the common end is reached for the benefit of everyone: if the office is betrayed and distorted into selfishness, it declines and inevitably undergoes expiation, longer or shorter according to the degree of guilt”*.

Terakhir, pemikiran sosialis, mengembangkan analisis ini, menemukan bahwa kapitalisme merupakan penyebab utama dari perang dan terkait penghapusan kepemilikan alat-alat produksi ke transformasi sosial yang, dengan membiarkan antagonisme antara kelas-kelas yang harus diatasi, seharusnya menghilangkan

⁷ Thomas Paine, *The Writings of Thomas Paine* vol. II (New York: Burt Franklin, 1969), hlm 387

imperialisme dan perang. Karl Marx dan Friedrich Engels menulis demikian dalam *The Communist Manifesto* mengingat konsep liberal: *“National differences and antagonisms between peoples are daily more and more vanishing, owing to the development of the bourgeoisie, to freedom of commerce, to the world market, to uniformity in the mode of production and in the conditions of life corresponding thereto”*. Dan mereka melanjutkan: *“The supremacy of the proletariat will cause them to vanish still faster. United action, of the leading civilized countries at least, is one of the first conditions for the emancipation of the proletariat. In proportion as the exploitation of one individual by another is put an end to, the exploitation of one nation by another will also be put an end to. In proportion as the antagonism between classes within the nation vanishes, the hostility of one nation to another will come to an end”*.⁸

Sebagai kesimpulan, dapat ditegaskan bahwa, ketika teori liberal, demokratis, nasionalis dan sosialis memikirkan masa depan hubungan internasional, mereka membayangkan bahwa rakyat, setelah menjadi tuan atas nasib mereka sendiri, setelah pembebasan mereka dari kekuasaan monarki dan aristokrat. Atau dari aturan borjuis dan kapitalis, tidak akan lagi memiliki alasan untuk konflik.

Setelah membaca keempat teori hubungan internasional, dapat diamati bahwa mereka memiliki beberapa kesamaan: mereka menjelaskan kebijakan internasional melalui kategori yang sama dengan yang mereka terangkan dalam kebijakan domestik, menghubungkan ketegangan internasional dan perang secara

⁸ Karl Marx, Friedrich Engels, *The Communist Manifesto* (1848), (New York: Penguin Books, 1967), hlm 102.

eksklusif dengan sifat struktur internal. Negara menganggap perdamaian sebagai konsekuensi otomatis dan diperlukan dari transformasi struktur internal dari negara.

Oleh karena itu, Internasionalisme merupakan konsep politik yang dari sudut pandang teoritis, tidak mengaitkan otonomi apapun dengan sistem politik internasional berkenaan dengan struktur internal negara-negara, dan kebijakan luar negeri berkenaan dengan kebijakan domestik. Selain itu, dari sudut pandang praktis, ia menganggap bahwa perjuangan untuk mencapai kebebasan, kesetaraan, kemerdekaan nasional dan keadilan-sosial dinegara telah mendahului tujuan perdamaian dan tatanan internasional.

Jika seseorang ingin mencapai pemahaman historis tentang fondasi nyata dari sudut pandang yang tersebar luas, perlu untuk mempertimbangkan struktur dan dinamika sistem produktif dan sistem negara dunia selama abad ke-19 dan ke-20. Untuk tujuan kita, itu sudah cukup untuk mendefinisikan aspek-aspek yang lebih umum dari konteks historis di mana kecenderungan internasionalisme menegaskan dirinya.

Identifikasi fondasi material internasionalisme, harus diamati bahwa pengembangan mode produksi industri, dalam fase awalnya, menentukan perluasan ke kolektivitas nasional hubungan produksi dan pertukaran dan semua aspek lain dari kehidupan sosial yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan mereka. Selanjutnya, hubungan sosial secara progresif melampaui batas-batas negara, mereka membuat masyarakat individu dimana umat manusia keluar

dari isolasi mereka sebelumnya dan membuat setiap masyarakat bergantung pada orang lain. Dengan demikira sistem ekonomi dan sosial dari dimensi dunia terbentuk, pasar dunia, dimana semua orang bergantung untuk memenuhi persyaratan mereka. Perkembangan sarana komunikasi dan transportasi telah membawa orang-orang lebih dekat bersama dan menyatukan masyarakat di planet kita. Ideologi internasionalis niscaya mencerminkan proses ini.

Disisi lain, harus dipertimbangkan bahwa fondasi nyata dari proses ini sesuai dengan fase sejarah Eropa dimana stabilitas politik internasional tidak terganggu oleh masalah serius. Dari tahun 1815 sampai 1914, dengan kata lain dari kongres wina hingga Perang Dunia Pertama, Eropa mengalami periode stabilitas politik internasional yang luar biasa, yang oleh Karl Polanyi disebut sebagai “*the hundred years peace*”. Dia mengamati bahwa, terlepas dari Perang Krimea, peristiwa kolonial yang lebih atau kurang, Inggris, Prancis, Prussia, Austria, Italia dan Russia terlibat dalam perang satu sama lain hanya selama delapan belas bulan.

Pembentukan dan pengembangan pasar dunia tidak dapat diperkirakan tanpa kondisi politik ini. Britania Raya memainkan peran yang menentukan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi ini. Britania Raya merupakan negara pertama yang berhasil melakukan revolusi industri dan telah mengumpulkan keuntungan semacam itu diatas negara-negara lain yang memiliki kepentingan konkret dalam mempertahankan dan mengembangkan kebebasan pertukaran internasional, karena ia dapat memainkan peran dominan dipasar dunia. kepemimpinan politik di London, dengan bantuan dua instrumen, satu moneter

dan militer lainnya, dengan demikian memastikan fungsi pasar dunia. Instrumen pertama adalah sistem moneter internasional, yang didirikan pada hegemoni pounds yang dipatok dengan standar emas, yang kedua adalah supremasi *Royal Navy* (angkatan laut Britania Raya).

Dengan demikian, mudah dipahami bagaimana perkembangan tertib dari sistem politik dan ekonomi internasional bukanlah hasil dari tatanan alami, karena pendukung pertukaran bebas dipertahankan, tetapi dari keadaan kebetulan yang secara historis sementara. Tetapi juga dipahami mengapa ideologi liberal, demokratis, nasional dan sosialis telah memberikan peran subordinat pada masalah-masalah tatanan internasional. Mereka dirumuskan dalam sebuah era dimana gerakan historis menempatkan masalah transformasi struktur internal negara-negara yang tinggi diagenda mereka, sementara perdamaian tampaknya menjadi konsekuensi yang diperlukan dari transformasi tersebut. Oleh karena itu, budaya politik yang berlaku tampaknya memberikan jawaban yang memuaskan terhadap keinginan untuk perdamaian karena stabilitas politik dan ekonomi internasional menyamarkan aspek ideologis internasionalisme. Pecahnya Perang Dunia Pertama menunjukkan ketidakmampuan sepenuhnya dari sudut pandang itu untuk meramalkan, memahami dan menghindari malapetaka manusia yang dahsyat itu. Dan kelas penguasa Eropa, yang menarik inspirasi untuk tindakannya dari sudut pandang ini, terbukti tidak mampu mengendalikan kekuatan buta yang disebabkan oleh dekadensi historis sistem negara-negara Eropa.

Batasan internasionalisme adalah batas-batas ideologi tradisional, yang menganggap perjuangan untuk menyatakan diri pada tingkat nasional cukup untuk

mencapai tujuan politik mereka. Mendasarkan interpretasi mereka tentang realitas sosial pada kebutuhan untuk membela kepentingan suatu bangsa atau kelas, pada akhirnya mereka menjadi tahanan skema budaya nasional, yang menjelaskan politik internasional dalam hal “keunggulan kebijakan domestik”.

Salah satu ekspresi teoritis yang paling luas dari sudut pandang ini dizaman kita adalah interpretasi dari perang ekonomi, yang telah menemukan formulasi kanoniknya dari Lenin tentang imperlialisme, yang menyatakan bahwa *“imperlialism is the monopoly stage of capitalism”*.⁹ Teori ini hanyalah satu contoh dari berbagai penjelasan sepihak tentang politik internasional, sebuah upaya untuk mengenal sistem negara mulai dari mempelajari satu aspek realitas sosial, seperti manusia atau struktur negara tunggal.

Mengenai interpretasi perang ekonomi, Lord Lothian telah mengamati: *“The division of the world into sovereign states long antedated modern capitalism. Capitalism does not cause war inside the state. Nor would it produce war inside a federation of nation. It is the division of humanity into sovereign states which disturbs the pacific functioning of capitalism as international force and causes war, not capitalism which is the cause of the division of the world into an anarchy of sovereign states”*.¹⁰

Sudut pandang yang menjadi dasar pertimbangan ini adalah teori *raison d’Etat*, yang berawal dari Machiavelli dan mengilhami beberapa cendekiawan

⁹ Vladimir Lenin, *Imperialism the Highest Stage of Capitalism* (1917) (Chicago: Henry Regnery Company, 1966), hlm. 295.

¹⁰ Lord Lothian, *Pacifism Is Not Enough* (1935) (New York: Lothian Foundation Press, 1990), hlm. 226.

masa kini dari hubungan internasional, seperti Hans Morgenthau, Raymond Aron dan Kenneth Waltz. Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa, karena pemisahan umat manusia kedalam negara-negara berdaulat, yang tidak mengenal kekuatan yang lebih tinggi, dunia diperintah oleh perang dan kekuatan. Akibatnya, keamanan menjadi prioritas utama yang harus dipilih pemerintah dan untuk kepentingannya, jika perlu prinsip-prinsip moralitas dan hukum harus dikorbankan.

Namun demikian, ada dua interpretasi berbeda dari *raison d'Etat*: nasionalis yang memahami pembagian umat manusia kedalam negara-negara berdaulat sebagai datum abadi, dan yang federalis, yang menganggap realitas ini hanya historis sementara. Yang terakhir ini menarik karena cenderung menghilangkan kekuatan dari politik internasional, secara bertahap mengatasi anarki kedaulatan nasional dan mendirikan keamanan negara-negara bukan pada angkatan bersenjata, tetapi pada pemerintah federal yang mampu menyelesaikan konflik antar negara atas dasar hukum.

Sejauh menyangkut hal tersebut, harus ditunjukkan bahwa selama Perang Dunia Pertama ada beberapa orang yang, meskipun mereka berasal dari tradisi sosial-komunis (Leon Trotsky) atau demokrasi liberal (Luigi Einaudi), mencoba belajar dari peristiwa baru dan tak terduga yang menandai titik balik dalam perjalanan sejarah. Sebuah ide baru, pada kenyataannya, mulai menegaskan dirinya, yang dikaitkan dengan krisis negara-bangsa, tanggung jawab untuk perang dan menunjuk pada alternatif yang tepat: United State of Europe (Eropa Serikat), dimaksudkan sebagai langkah menuju penyatuan dunia. Dengan kata

lain, perang ditafsirkan sebagai konsekuensi dari kontradiksi antara internasionalisasi proses produktif dan pemisahan dunia menjadi negara-negara berdaulat yang saling bertentangan. Luigi Einaudi mendefinisikan perang dunia sebagai *“the bloody struggle to elaborate a political form of a superior order”* kepada negara bangsa, dan Leon Trotsky sebagai kekuatan pemberontak yang dikembangkan oleh kapitalisme yang digunakan oleh negara bangsa.

Semua ini menunjukkan bahwa ada aspek negatif dari perkembangan teknologi: setiap konflik mengancam menyebar keseluruh dunia. Perang Dunia adalah ekspresi negatif dari tren historis menuju penyatuan Eropa dan dunia. Sifat absolut perang di era industri menunjukkan bahwa manusia telah memperoleh kekuatan untuk menghancurkan dunia, tetapi belum dapat untuk memerintahnya, ini tergantung pada fakta bahwa dunia diatur dalam negara-negara merdeka dan berdaulat yang, pada saat pembentukan mereka dan untuk abad-abad sebelumnya, mewakili prinsip keteraturan dalam kekacauan politik, tetapi sekarang tidak lagi sesuai dengan situasi baru sebuah dunia yang semakin saling ketergantungan.

Perkembangan interdependensi (saling ketergantungan) telah membuat hubungan antar negara lebih dekat dan telah meningkatkan kebutuhan untuk mengatur masalah ekonomi, moneter, energi, sosial, lingkungan, budaya dan kebijakan lainnya ditingkat internasional. Atas dasar inilah sistem negara dunia dibentuk, yang telah memberilam dimensi global kepada dunia politik. Metode diplomasi tradisional telah terbukti tidak memadai dalam mengatur hal-hal yang semakin diasumsikan sifat masalah pemerintah.

Analisis nilai-nilai, kondisi historis dan sosial, dan lembaga-lembaga internasionalisme, telah menunjukkan keterbatasan sudut pandang ini. Sekarang adalah menarik beberapa kesimpulan.

Keterbatasan internasionalisme terdiri dari pengabaian otonomi yang dimiliki oleh struktur negara karena pemisahan umat manusia kedalam negara-negara berdaulat, dan hambatan yang mereka wakili untuk mencapai solidaritas nyata di antara masyarakat. Faktanya ada kontradiksi yang tidak dapat diperbaiki antara aspirasi terhadap kemerdekaan dan persamaan semua bangsa, dan pemisahan politik mereka. Pemisahan mengubah masyarakat menjadi kelompok-kelompok bersenjata dan bermusuhan, dan dalam jangka panjang tidak mungkin, bagi mereka untuk hidup berdampingan dengan damai. Distribusi kekuatan politik yang tidak merata antar negara menentukan hubungan hegemoni dan imperialis dipihak negara-negara yang lebih kuat dengan yang lebih lemah.

Budaya politik yang lazim terinspirasi dari liberal, demokratis, nasional dan sosialis memilih sebagai wilayah komitmen eksklusifnya upaya untuk mengubah bentuk rezim di negara-negara yang ada, tetapi menganggap negara-bangsa sebagai sesuatu yang alami, dan karenanya satu-satunya kerangka yang mungkin, untuk perselisihan politik. Nasionalisme, dengan kata lain prioritas yang diberikan kepada tingkat nasional, tidak sering muncul dalam aspek yang sebenarnya, tetapi dengan topeng internasionalisme, justru menyembunyikan kontradiksinya dengan prinsip universal kebebasan, kesetaraan dan solidaritas.

Sebagaimana yang ditulis Emery Reves, “*internasionalism does not and never has opposed nationalism and the evil effects of the nation-state structure*”.¹¹ Dengan kata lain, internasionalisme pasif mengasimilasi prinsip kedaulatan nasional yang tidak terbatas, dengan semua yang mengikuti (anarki internasional dan hubungan kekuatan antar negara), tetapi tidak mempertimbangkan masalah memodifikasi bentuk hubungan antara masyarakat dan negara. Ini menerima premis anti-demokrasi nasionalisme dan pendekatan diplomatik-antar pemerintah, yang membuat orang-orang keluar dari politik internasional dan tidak bersedia mengorbankan kepentingan nasional demi kerjasama internasional. Pada dasarnya, ini mewakili utopia hubungan pasifis antara negara-negara berdaulat, sebagai kesimpulan, ini hanyalah variasi dari konsep keselarasan kepentingan natural, yang diterapkan pada hubungan internasional.

Selama dunia diatur menurut prinsip kedaulatan nasional, politik internasional akan diperintah oleh hubungan kekuatan antar negara. Akibatnya, untuk mempertahankan keamanan negara pemerintah akan cenderung mengorbankan prinsip-prinsip hukum dan moralitas.

Untuk menghilangkan kekuatan dari hubungan internasional perlu untuk mengatasi anarki kedaulatan nasional dan keamanan negara bukan pada tentara, tetapi pada pemerintah federal diseluruh dunia, mampu menyelesaikan konflik dalam kerangka hukum. Federalisme, dengan mengidentifikasi penyebab utama perang dalam pemisahan umat manusia kedalam negara-negara berdaulat, dan instrumen untuk mencapai perdamaian dalam pemerintahan diseluruh dunia,

¹¹ Emery Reves, *The Anatomy of Peace* (1945) (New York: Penguin Books, 1947), hlm. 154-155.

memungkinkan dua situasi yang berbeda dimana manusia dapat menemukan dirinya untuk dipertimbangkan dengan jelas: anarki internasional, dimana internasional politik adalah hasil yang tidak diinginkan dan tidak terduga dari bentrokan antara kebijakan nasional, dan pemerintahan diseluruh dunia yang memiliki kekuatan untuk memutuskan politik dunia, yang dengan demikian menjadi produk kehendak manusia.

Federasi adalah satu-satunya bentuk organisasi kekuasaan yang memungkinkan anarki internasional untuk diatasi dan hubungan kekuatan antar negara harus dihilangkan seperti yang ditulis Immanuel Kant, perdamaian bukan hanya situasi damai satu perang berakhir tetapi dimana itu menjadi mungkin *“to end all wars forever”*.¹² Dalam tatanan ini, ia menyebutkan, *“every nation, even the smallest, can expect to have security and rights, not by virtue of its own might is right, but from this great federation of peoples alone, from a united might and from decisions made by the united will in accord with laws”*.¹³

Walau demikian, evolusi sejarah yang tampak bergerak kearah ini. Pemilihan langsung Parlemen Eropa telah memulai pecobaan pertama demokrasi internasional. Tentu saja, ini adalah eksperimen yang tidak lengkap, yang masih menunggu orang-orang Eropa untuk diakui, bersama dengan kekuatan untuk memilih wakil mereka sendiri, serta memutuskan siapa yang mengatur Komunitas Eropa dan mengendalikan program pemerintah. Namun, perluasan partisipasi demokratis dari nasional keranah internasional, merupakan prasyarat untuk

¹² Immanuel Kant, *Perpetual Peace and Other Essays* (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1983) hlm. 117

¹³ Ibid, hlm. 34-35

mencapat kontrol populer dari sektor kehidupan politik yang sebelumnya merupakan dominasi eksklusif dari *raison d'Etat* dan karena itu bentrokan diplomatis dan militer antar negara. Dengan demikian, pemilu Eropa membuka pelanggaran pertama di benteng *raison d'etat*, yang membawa gelombang internasionalisme. Semua ini menunjukkan bahwa penyatuan Eropa menandai tahap penting dalam sejarah: mengatasi rumusan negara-bangsa (ekspresi pemisahan politik terdalam dan sentralisasi kekuatan paling kuat yang pernah dikenal sejarah modern) untuk memecahkannya. Masalah peningkatan interdependensi antar negara mulai bergerak menuju organisasi perdamaian di seluruh planet ini.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi untuk penelitian kualitatif terdiri tiga bagian, yaitu bagian awal, inti, dan bagian akhir.

1. Bagian awal terdiri atas:
 - a. Halaman Judul
 - b. Halaman Persetujuan
 - c. Abstrak
 - d. Kata Pengantar
 - e. Daftar Isi

2. Bagian inti terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Internasionalisme
- B. Sejarah Internasionalisme

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Analisis Data
- E. Uji Validasi dan Reliabilitas Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Situasi Sosial Politik Inggris Masa Tony Blair
- B. Biografi Tony Blair
- C. Tokoh yang Berpengaruh bagi Tony Blair
- D. Internasionalisme Menurut Tony Blair Berdasarkan Buku *A Global Alliance for Global Value*
- E. Relevansinya Terhadap Komunitas Internasional dan Indonesia
- F. Kritik Terhadap Pemikiran Tony Blair

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
 - B. Saran
3. Pada bagian akhir terdiri atas, Daftar Pustaka dan Lampiran